



Submitted April 29, 2025

Revised May 04, 2025

Accepted June 2, 2025

DOI :<https://doi.org/10.53565/nivedana.v6i1.1613>

KAJIAN TEORI KOMUNIKASI JÜRGEN HABERMAS: FONDASI RASIONALITAS DALAM INTERAKSI SOSIAL

Tiara Nisa Aryanto¹, Fitzgerald Kennedy Sitorus²

Abstrak

Tulisan ini membahas teori komunikasi Jürgen Habermas sebagai fondasi rasionalitas dalam interaksi sosial modern. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan dipenuhi oleh kepentingan politik, ideologi, serta dominasi simbolik, komunikasi publik kerap mengalami distorsi yang menghambat tercapainya pemahaman bersama. Melalui pendekatan studi pustaka, artikel ini mengulas konsep-konsep utama dalam teori Habermas seperti tindakan komunikatif, klaim validitas, kompetensi komunikatif, situasi tutur ideal, dan komunikasi yang terdistorsi secara sistematis. Pembahasan juga mencakup relevansi teorinya dalam konteks kontemporer, seperti perdebatan di media sosial, praktik pendidikan, serta dinamika dalam keluarga dan institusi publik. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun teori Habermas dianggap idealistik dan mengutamakan konsensus, kurang memperhatikan aspek emosi dan konteks budaya, kerangka ini tetap relevan sebagai acuan untuk mengevaluasi kualitas komunikasi yang adil, terbuka, dan berbasis argumen. Sebagai refleksi kritis, tulisan ini mendorong pentingnya literasi komunikasi dan budaya diskursus rasional sebagai bagian dari penguatan ruang publik yang demokratis dan inklusif.

Kata Kunci: Komunikasi, Rasional, Habermas, Interaksi Sosial

Abstract

This paper discusses Jürgen Habermas' theory of communication as the foundation of rationality in modern social interaction. In an increasingly complex society filled with political interests, ideologies, and symbolic domination, public communication often experiences distortions that hinder the achievement of mutual understanding. Through a literature review, this article examines key concepts in Habermas' theory, such as communicative action, validity claims, communicative competence, the ideal speech situation, and systematically distorted communication. The discussion also covers the relevance of his theory in contemporary contexts, such as debates on social media, educational practices, and dynamics within families and public institutions. This article demonstrates that although Habermas' theory is considered idealistic and consensus-oriented, with little attention to emotional aspects and cultural contexts, this framework remains relevant as a reference for evaluating the quality of communication that is fair, open, and argument-based. As a critical reflection, this paper encourages the importance of communication literacy and a culture of rational discourse as part of strengthening a democratic and inclusive public sphere.

Keywords: Communication, Rational, Habermas, Social Interaction

¹Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Pelita Harapan, 01689240031@student.uph.edu

²Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Pelita Harapan, fitzerald.sitorus@uph.edu

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan fondasi utama dalam kehidupan sosial manusia. Melalui komunikasi, individu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman bersama, menegosiasikan makna, serta mengoordinasikan tindakan sosial. Komunikasi berkaitan dengan proses penciptaan makna: pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana orang menciptakan makna secara psikologis, sosial, dan budaya; bagaimana pesan-pesan dipahami secara intelektual; serta bagaimana ambiguitas muncul dan diselesaikan (Ruler, 2018: 368).

Dalam konteks masyarakat modern yang kompleks, tantangan komunikasi menjadi semakin nyata, baik karena perbedaan nilai, kepentingan politik, maupun dominasi struktur sosial tertentu. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan fragmentasi identitas budaya turut memperumit proses pertukaran makna antarkelompok sosial. Komunikasi tidak lagi berlangsung secara sederhana, melainkan berada dalam arus interaksi yang sering kali dipenuhi dengan ketimpangan kekuasaan, manipulasi informasi, dan dominasi simbolik.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya menghadirkan kembali komunikasi yang rasional dan terbuka di tengah era post-truth, di mana informasi tersebar begitu cepat tetapi tidak selalu dapat diverifikasi secara objektif. Dalam diskursus publik kontemporer, terutama di media sosial, kita kerap menyaksikan degradasi rasionalitas, polarisasi opini, serta penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Kondisi ini mendorong kita untuk meninjau ulang model komunikasi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip argumentatif, transparansi, dan kesetaraan antar partisipan.

Hal menarik dari riset ini adalah penekanannya pada dimensi normatif dari komunikasi: bukan sekadar bagaimana komunikasi berlangsung, tetapi bagaimana seharusnya komunikasi dilakukan agar adil dan produktif dalam membangun konsensus sosial. Teori Jürgen Habermas menawarkan pendekatan filosofis sekaligus praktis untuk mengkaji komunikasi dalam bingkai etika dan rasionalitas. Di tengah kritik bahwa komunikasinya terlalu idealistik dan kurang mempertimbangkan konteks budaya serta emosi, justru letak kekuatan teorinya adalah pada kapasitas reflektif dan evaluatif terhadap kualitas komunikasi publik saat ini.

Sejumlah penelitian relevan telah menunjukkan signifikansi teori Habermas dalam berbagai bidang. Misalnya, penelitian yang mengkaji penerapan tindakan komunikatif dari Habermas dapat membantu menerangi debat akademis dalam gerakan sosial (Schlosberg, 1995). Selanjutnya, konsep wacana demokratis dalam konteks deliberasi publik dapat memberikan kerangka teoretis untuk memperkuat partisipasi publik dalam merespons dominasi kekuasaan oligarki (Lewar & Madung, 2022). Dalam konteks lokal, terdapat penelitian yang menyoroti kegagalan komunikasi pemerintah dan masyarakat dalam situasi pandemi yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau ruang diskursus yang rasional dan setara (Pratiwi et al., 2022). Penelitian-penelitian tersebut menggarisbawahi perlunya pendekatan komunikatif yang lebih mendalam dan normatif, sebagaimana ditawarkan oleh Habermas.

Dalam kajian ilmu komunikasi, teori Habermas menjadi bagian penting dalam tradisi teori kritis, yang tidak hanya menganalisis struktur pesan dan media, tetapi juga mempermasalahkan relasi kekuasaan dalam proses komunikasi. Teori tindakan komunikatif (*theory of communicative action*) Habermas berpijak pada asumsi bahwa komunikasi manusia memiliki dimensi rasional yang dapat diverifikasi melalui argumentasi terbuka. Dengan kata lain, komunikasi bukan hanya media transfer pesan, melainkan medan praktik sosial yang harus diatur oleh prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, keterpahaman, dan kepatutan (Munir, 2023).

Diskursus publik, yang idealnya menjadi ruang dialog rasional antar warga, kerap terdistorsi oleh berbagai kepentingan yang terselubung. Dalam situasi seperti ini, kebutuhan akan model komunikasi yang menjunjung tinggi rasionalitas, kesetaraan, dan keterbukaan menjadi semakin mendesak. Hal inilah yang menjadi alasan utama bagi Jürgen Habermas dalam merumuskan teori komunikasinya, yang berusaha mengembalikan fungsi komunikasi sebagai medium pembentukan konsensus bersama melalui proses diskursus yang bebas dari paksaan dan distorsi sistematis.

Jürgen Habermas merupakan seorang filsuf dan sosiolog Jerman terkemuka, merespons tantangan ini dengan mengembangkan sebuah model komunikasi yang berlandaskan pada rasionalitas. Ia tidak hanya tertarik pada bagaimana manusia berkomunikasi, tetapi juga pada kondisi normatif yang memungkinkan komunikasi berlangsung secara adil dan tanpa distorsi. Teori komunikasinya lahir dari kritik terhadap Mazhab Frankfurt, filsafat bahasa, dan refleksi atas

kondisi sosial-politik pasca Perang Dunia II.

Tulisan ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif teori komunikasi Habermas, menyoroti konsep-konsep kunci seperti kompetensi komunikatif, tindakan komunikatif, klaim validitas, dan situasi bicara ideal. Selain itu, artikel ini akan mengkaji implikasi teorinya terhadap interaksi sosial di era kontemporer serta menawarkan evaluasi kritis atas kelebihan dan keterbatasannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan kontribusi teoretis terhadap kajian komunikasi, tetapi juga membuka ruang refleksi kritis untuk membangun praktik komunikasi publik yang lebih rasional, demokratis, dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) sebagai teknik utama pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas bersifat teoritis dan filosofis, berfokus pada pemahaman mendalam terhadap gagasan-gagasan Jürgen Habermas dalam kerangka teori komunikasi. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep-konsep kunci dalam teori komunikasi Habermas serta mengeksplorasi relevansi dan implikasinya dalam konteks komunikasi sosial dan ruang publik kontemporer.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber sekunder yang terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, serta tulisan-tulisan orisinal Habermas maupun penafsiran para pemikir lain terhadap teorinya. Seluruh sumber dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi struktur konseptual teori komunikasi Habermas, termasuk elemen-elemen seperti rasionalitas komunikatif, kompetensi komunikatif, klaim validitas, tindakan komunikatif, dan situasi bicara ideal.

Analisis dilakukan dengan cara menelaah keterkaitan antar konsep, memperhatikan konteks historis dan filosofis pembentukannya, serta mengaitkannya dengan permasalahan komunikasi dalam masyarakat modern. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menyajikan pemaparan teoretis, tetapi juga interpretasi kritis yang memungkinkan pembaca memahami kegunaan dan keterbatasan teori Habermas dalam praktik komunikasi kontemporer.

PEMBAHASAN

Kompetensi Komunikatif Rasional

Kompetensi komunikatif adalah suatu upaya untuk mewujudkan klaim-klaim dengan melibatkan serangkaian deduksi yang kompleks dalam pembuktiannya, dimana Habermas berusaha menunjukkan bahwa realisasi kebenaran dan kehidupan yang baik terkait secara erat dengan struktur komunikasi, dan bahwa kemungkinan komunikasi manusia itu sendiri mengandaikan keberadaan standar normatif tertentu (Burleson & Kline, 1979: 414). Kompetensi komunikatif tidak hanya mencakup pemahaman bahasa tetapi juga kemampuan individu untuk membuat klaim yang dapat diuji secara rasional dalam konteks interaksi sosial.

Debat dalam forum publik atau media sosial merupakan contoh penerapan kompetensi komunikatif rasional, dimana seseorang memberikan argumen berdasarkan data yang valid & rasional, bukan hanya opini atau emosi belaka. “Peran sosial media dalam kebebasan berekspresi merujuk pada kontribusi dan dampak platform-platform ini terhadap kemampuan individu untuk menyuarakan pendapat, ide, dan keyakinan mereka secara luas dan terbuka” (Amiruddin et al., 2024: 90). Ketika pengguna bersuara secara terbuka dan bebas di media sosial tanpa adanya data yang valid, maka akan rentan terjadinya disinformasi, bias, bahkan hingga serangan personal seseorang, sehingga hal ini akan menghambat terjadinya tujuan diskursus yang rasional.

Pragmatisme Universal dan Tata Bahasa Dalam Tindak Tutur

Teori pragmatisme universal ini mencakup rekonstruksi rasional atas aturan-aturan pragmatis (berbeda dari aturan sintaksis atau semantik) yang harus dikuasai oleh pembicara yang kompeten agar dapat menciptakan dan mempertahankan komunikasi intersubjektif (Burleson & Kline, 1979: 414). Menurut Habermas, aspek-aspek realitas yang hadir dalam setiap kita berkomunikasi ini meliputi: (1) dunia eksternal: realitas objektif di luar diri kita seperti dunia fisik, fakta, dan kejadian yang bisa diverifikasi secara empiris; (2) realitas batin pembicara: pengalaman subjektif si pembicara seperti perasaan, niat, kepercayaan, atau motivasi; (3) realitas normatif masyarakat: struktur nilai, aturan, dan norma sosial yang mengatur tindakan dalam

374

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 2, April - June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

masyarakat; (4) intersubjektivitas bahasa: kapasitas bahasa untuk menciptakan pemahaman bersama antara dua atau lebih individu.

Tindak tutur sebagai unit dasar dari ujaran, yakni “urutan ujaran (verbal) terkecil yang dapat dipahami dan diterima oleh setidaknya satu pelaku lain yang kompeten dalam konteks komunikasi” (Burlison & Kline, 1979: 415). Dalam melakukan tindak tutur, seorang pembicara tidak hanya mengungkapkan isi tertentu, tetapi juga menempatkan isi tersebut dalam konteks relasional tertentu yang memungkinkan isi tersebut dipahami. Keempat kategori tindak tutur diantaranya: (1) Tindak komunikatif: berfokus pada hubungan antara penutur dan medium linguistik dari ujaran; contohnya ketika orangtua dan anak berdiskusi mengenai aturan bermain gadget, "Kamu tahu maksud Ibu waktu bilang 'bermain dengan bijak'? Itu artinya bukan sepanjang hari, ya!" hal ini orangtua menjelaskan maksud dari istilah yang dipakai, menyoroti penggunaan bahasa itu sendiri. (2) Tindak konstatatif: dunia objektif atau fakta, mengklaim sesuatu tentang realitas; orangtua akan memberikan gambaran fakta kepada anaknya, "Terlalu lama menatap layar bisa bikin mata kamu cepat lelah dan sulit tidur." (3) Tindak representatif: ekspresi subjektivitas pembicara, apa yang diyakini, dirasakan, atau diinginkan; "Tapi kalau aku cuma main sebentar, aku belum puas" disini anak mengungkapkan perasaan pribadi, bukan menyatakan fakta objektif. (4) Tindak regulatif: berkaitan dengan hubungan antara penutur dan pendengar, misalnya memberi perintah, permintaan, atau ajakan; "Mulai sekarang, kamu boleh main satu jam setelah PR selesai. Setuju?" lalu orangtua menetapkan aturan dan meminta persetujuan anak.

“Keluarga konsensual terlibat banyak percakapan, tetapi kepala keluarga atau orang yang memiliki otoritas-biasanya akan membuat keputusan. Sedangkan dalam keluarga pluralistik, akan ada banyak percakapan yang tidak terkendali, dan semua orang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga, menghasilkan banyak percakapan keluarga dengan orang tua menerima keputusan anak-anak jika didasarkan pada argumen yang baik” (Littlejohn et al., 2021: 230).

Klaim Validitas, Tindakan Komunikatif, Dan Wacana

Klaim validitas terkait keterpahaman dan ketulusan ditebus melalui tindakan komunikatif lebih lanjut; keterpahaman dipulihkan melalui negosiasi mengenai penggunaan bahasa, dan ketulusan ditegakkan melalui interaksi di mana tindakan dan pernyataan pihak lain dibandingkan

375

Nivedana: Journal of Communication and Language

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri

Volume 6, Number 2, April - June 2025 / nivedana@radenwijaya.ac.id

(Burleson & Kline, 1979: 418). Keempat jenis klaim diantaranya: (1) keterpahaman: klaim bahwa suatu ujaran dapat dipahami secara timbal balik; (2) kebenaran: klaim bahwa isi proposisional dari tindak tutur itu jelas dalam pernyataannya dan disetujui oleh pendengar; (3) kejujuran atau ketulusan: klaim bahwa pembicara dengan sungguh-sungguh dan tepat bermaksud seperti apa yang diucapkannya; (4) kepatutan: klaim bahwa pembicara bertindak sesuai dengan norma dan aturan sosial yang dibagi bersama.

Jika klaim kebenaran atau kepatutan suatu norma tidak dapat diselesaikan melalui penjelasan atau pembenaran, maka para pihak peserta akan dihadapkan pada pilihan, menghentikan komunikasi sepenuhnya, atau beralih ke bentuk interaksi dengan menaikkan komunikasi ke tingkat wacana. Wacana adalah mode komunikasi di mana kebenaran atau kepatutan suatu ujaran diperiksa secara kritis oleh para pelaku interaksi dan diterima atau ditolak melalui argumentasi. Wacana hanya akan berakhir ketika para peserta mencapai konsensus yang saling memuaskan.

Teknologi AI saat ini dapat memberikan umpan balik terhadap aktivitas belajar dan latihan soal siswa, kemudian memberikan rekomendasi materi yang perlu dipelajari kembali layaknya guru atau tutor (Fitria, 2021: 136). Hal ini menimbulkan adanya diskusi antara para guru dan murid, dimana semua peserta sebelumnya telah mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan "AI" atau "ChatGPT" (keterpahaman). Pernyataan seperti "ChatGPT bisa membantu siswa memahami pelajaran" dianggap benar oleh sebagian peserta (kebenaran), sehingga diharapkan bahwa peserta (misalnya guru atau siswa) berbicara dengan jujur mengenai pengalaman mereka selama menggunakan AI (kejujuran), serta setiap pendapat yang disampaikan sesuai dengan norma debat publik yang sopan dan adil (kepatutan).

Akan tetapi, ditengah diskusi muncul konflik seperti beberapa guru yang mengatakan bahwa siswa yang memakai ChatGPT untuk mengerjakan tugas itu berarti curang, sementara beberapa siswa menjawab terkait ChatGPT hanya mereka gunakan untuk memahami tugasnya saja, bukan menyalin sepenuhnya. Hal ini menghadirkan keraguan terhadap klaim validitas, misalnya "Apakah memakai ChatGPT itu melanggar norma dalam akademik serta membuat siswa menjadi malas berpikir?" atau "Apakah para siswa tersebut benar-benar hanya "belajar" atau

justru berbohong agar tidak dihukum?”. Saat itu, diskusi berubah menjadi wacana, karena peserta tidak lagi hanya bertukar pendapat, tapi mulai mengkritisi kebenaran, norma, dan tujuan satu sama lain, dan mencoba mencapai konsensus berbasis argumen, bukan otoritas. Jika wacana berhasil dan semua pihak menyepakati, maka konsensus baru tercipta dan komunikasi bisa berlanjut ketahap perumusan aturan atau kebijakan penggunaan AI dalam pendidikan.

Situasi Bicara Ideal dan Konsensus Rasional

Menurut Habermas, “makna kebenaran bukan terletak pada fakta bahwa suatu konsensus telah tercapai, melainkan bahwa di segala waktu dan tempat, jika kita hanya bersedia terlibat dalam diskursus, maka konsensus dapat dicapai dalam kondisi yang menunjukkan bahwa konsensus tersebut beralasan. Kebenaran berarti keterjaminan yang dapat diklaim” (Burleson & Kline, 1979: 421). Argumen yang meyakinkan secara rasional mendorong partisipan dalam diskursus untuk menerima suatu klaim kebenaran atau klaim kelayakan. Konsensus yang di rasional bergantung pada kebebasan untuk mengkaji secara kritis medan konseptual tempat data dan justifikasi dari argumen substansial itu berada.

Proses komunikasi yang bebas dari paksaan menjadi kunci untuk mencapai konsensus rasional dimana kesepakatan yang dicapai bersama melalui pemikiran rasional yang melibatkan fakta, data, dan nilai. Selama terdapat kebebasan untuk berpindah antar-tingkat diskursus, konsensus dapat dianggap lahir dari “kekuatan argumen yang lebih baik”, bukan dari ideologi, paksaan, atau dominasi. Konsensus yang beralasan hanya dicapai jika dan hanya jika kebebasan bergerak di antara tingkat-tingkat diskursus dijamin oleh sifat formal dari diskursus itu sendiri.

Situasi tutur ideal didefinisikan sebagai kondisi diskursus di mana tidak ada kekuatan selain kekuatan argumen yang lebih baik yang menentukan hasil diskusi (Burleson & Kline, 1979: 422). Dalam situasi tutur ideal, setiap peserta memiliki hak yang sama untuk mengemukakan dan mempertanyakan klaim validitas. Tidak ada batasan pada partisipasi, dan semua orang yang berkepentingan dengan hasil diskursus harus disertakan. Semua argumen harus terbuka untuk pemeriksaan kritis oleh semua peserta; tidak boleh ada bentuk paksaan eksternal maupun internal, baik psikologis, ideologis, atau sosial yang menghalangi kebebasan berpendapat.

Seperti seorang hakim Mahkamah Konstitusi dan peserta yang menerapkan situasi tutur ideal dengan cara berdiskusi tentang isu hak asasi manusia dalam forum yang bebas dari tekanan politik langsung, mendasarkan pertimbangan pada argumen hukum, moral, dan prinsip keadilan, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kekuasaan. Sehingga putusan akhirnya merupakan bentuk konsensus normatif yang mengklaim validitas karena berdasar pada argumen hukum dan rasionalitas etis, bukan sekedar suara mayoritas atau tekanan politik. Namun pada kenyataannya, situasi tutur ideal ini jarang terwujud sepenuhnya. Akan tetapi, semakin suatu forum mendekati kondisi ini, semakin besar pula peluang munculnya konsensus rasional, yakni kesepakatan yang tidak lahir dari tekanan, melainkan dari saling pengertian berdasarkan argumen terbaik.

Komunikasi yang Terdistorsi secara Sistematis

Komunikasi sering kali dipengaruhi oleh kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang menciptakan distorsi sistematis. Konsep komunikasi yang terdistorsi secara sistematis diperkenalkan oleh Habermas untuk menjelaskan hambatan dalam komunikasi rasional yang timbul karena distorsi baik pada tingkat individu maupun sosial (Burleson & Kline, 1979: 419). Komunikasi yang terdistorsi terjadi ketika interaksi tidak berlangsung secara rasional atau ideal, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan tersembunyi, manipulasi, dominasi, atau tekanan sosial.

Terdapat dua bentuk utama distorsi pada komunikasi menurut Habermas: (1) distorsi neurosis: distorsi yang terjadi pada tingkat individu karena konflik psikologis yang tidak terselesaikan. Seperti contoh konflik dalam hubungan pasangan seringkali melibatkan distorsi seperti penyangkalan, rasionalisasi, dan penipuan untuk meminimalkan peran seseorang dalam menciptakan konflik atau menyalahkan pasangan lain. Teori kognitif kemudian menjelaskan distorsi sebagai proses mental yang muncul dari disonansi kognitif, yaitu “keadaan ketegangan yang terjadi ketika seseorang memegang dua kognisi (ide, sikap, keyakinan, pendapat) yang secara psikologis tidak konsisten” (Whiting & Cravens, 2016: 253). Ketika individu mengalami disonansi kognitif, mereka cenderung menghindari argumen yang menantang keyakinan mereka, sehingga proses komunikasi tidak lagi berlangsung secara rasional, terbuka, dan argumentatif.

Bentuk distorsi selanjutnya adalah (2) distorsi ideologi: distorsi yang muncul dalam masyarakat akibat sistem kepercayaan yang menekan pemikiran kritis dan kebebasan diskursus.

Contoh lainnya adalah sebagian besar audiens tidak sepenuhnya terisolasi atau tertutup dari ‘kerangka dan perspektif’ yang menantang pandangan (ideologi) mereka. Namun, hal ini tidak selalu mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang pandangan (ideologi) pihak lain. Sebaliknya, pengguna mungkin bahkan terlibat dengan kerangka yang bertentangan, akan tetapi dengan cara yang tidak ramah dan meremehkan: misalnya, dengan mengomentari betapa “bodohnya” pemikiran orang lain yang tidak mereka setuju (Brüggemann & Meyer, 2023: 137).

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat paparan terhadap pandangan alternatif, keterbukaan terhadap diskursus rasional tetap terhambat oleh bias ideologis yang tertanam kuat dalam cara berpikir individu atau kelompok. Dalam konteks ini, komunikasi tidak berfungsi sebagai sarana untuk mencapai pemahaman bersama, melainkan menjadi arena pertarungan di ruang publik, terutama di media sosial. Berdasarkan kedua bentuk teori distorsi ini, telah memberikan penjelasan yang masuk akal akan penyebab seseorang tidak bisa atau tidak mampu membenarkan klaim mereka atas kebenaran dan kesesuaian normatif, sehingga tidak dapat didasarkan atau dibenarkan pendapatnya.

Kritik Terhadap Teori Komunikasi Habermas

Dalam penerapannya, terdapat sejumlah kritik terhadap komunikatif rasional dari Jürgen Habermas yang menjadi perhatian. Pertama, salah satu kritik paling umum terhadap teori komunikasi Habermas adalah terlalu idealistik dan sulit diterapkan dalam realitas sosial. Model situasi bicara ideal yaitu kondisi komunikasi yang setara, bebas dari tekanan atau dominasi, sulit diterapkan dalam kenyataannya. Komunikasi tidak sepenuhnya lepas dari bias ideologis maupun neurosis. Dalam rapat kerja, idealnya semua orang bisa berbicara secara rasional dan setara. Namun, kenyataannya ada faktor hierarki, tekanan dari atasan, dan kepentingan perusahaan yang membuat komunikasi tidak sepenuhnya bebas.

Kedua, rasionalitas menjadi syarat utama dalam komunikasi yang ideal. Namun pendekatan ini dianggap mengabaikan aspek lain dari manusia, seperti emosi, intuisi, imajinasi, dan ekspresi non-verbal. Komunikasi dalam kehidupan nyata sering kali melibatkan ekspresi afektif dan simbolik yang tidak selalu bisa dijustifikasi melalui argumen rasional. Dalam konteks budaya tertentu, cara berkomunikasi yang tidak langsung, penuh metafora, atau emosional justru dianggap

lebih efektif. Seperti pada kampanye sosial, terkadang lebih efektif menggunakan pendekatan emosional seperti video yang menyentuh hati daripada sekadar argumen logis.

Ketiga, tidak semua komunikasi bertujuan mencapai konsensus atau kesepakatan. Dalam banyak kasus, konflik, perbedaan pendapat, atau bahkan penolakan terhadap konsensus justru diperlukan untuk menjaga dinamika demokrasi dan keberagaman perspektif. Seperti contoh, para buruh di sebuah pabrik menginginkan kenaikan gaji, sementara perusahaan ingin menekan biaya produksi. Sehingga tidak selalu ada titik temu kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak dalam kasus ini.

Keempat, kurangnya sensitivitas terhadap konteks sosial dan budaya. Habermas mengasumsikan bahwa semua partisipan komunikasi memiliki pemahaman yang sama tentang norma-norma. Namun dalam realitas multikultural, norma sosial dan bentuk komunikasi sangat bervariasi antar budaya. Misalnya, dalam budaya timur anak yang lebih muda secara umur cenderung menghindari konfrontasi secara langsung, tidak boleh ‘melawan orangtua’. Sedangkan pada budaya barat, orang tua dan anak dapat secara bebas melakukan diskusi mengajukan klaim validitasnya.

KESIMPULAN

Teori komunikasi Jürgen Habermas menekankan pentingnya rasionalitas, kesetaraan, dan keterbukaan dalam interaksi sosial untuk mencapai konsensus yang beralasan. Melalui konsep tindakan komunikatif, klaim validitas, dan situasi bicara ideal, Habermas menawarkan komunikasi ideal yang bebas dari dominasi dan distorsi. Namun, dalam praktiknya, komunikasi sering terdistorsi oleh kepentingan ideologis, tekanan sosial, dan konflik psikologis yang menghambat tercapainya pemahaman bersama. Meskipun teorinya dianggap terlalu idealistik dan kurang sensitif terhadap konteks budaya serta peran emosi, pendekatan Habermas tetap relevan sebagai fondasi komunikasi ideal untuk menilai kualitas komunikasi publik di era modern saat ini. Sebagai rekomendasi, penting bagi pelaku komunikasi, baik di ruang publik, media, pendidikan, maupun institusi pemerintahan, untuk mendorong budaya diskursus yang terbuka, kritis, dan berbasis pada argumen yang dapat diuji secara rasional.

Kontribusi riset ini bagi dunia akademis adalah memperkuat posisi teori komunikasi kritis, khususnya dari Habermas sebagai alat reflektif dan evaluatif dalam membaca fenomena komunikasi modern. Penelitian ini memperjelas bagaimana teori Habermas dapat diaplikasikan dalam konteks konkret seperti debat di media sosial, penggunaan AI dalam pendidikan, atau dinamika komunikasi dalam keluarga. Hal ini membuka ruang pengembangan lebih lanjut dalam studi komunikasi normatif, etika diskursus, dan pendidikan literasi media yang perlu diperkuat agar masyarakat mampu mengenali distorsi ideologis dan terlatih membangun dialog yang inklusif dan bebas dari paksaan. Dengan demikian, prinsip-prinsip komunikatif Habermas dapat diwujudkan secara lebih nyata dalam kehidupan sosial kontemporer.

REFERENSI

- Amiruddin, Ramadani, S. A., Farahnisa, A., Sofa, N., & Hutaaruk, W. I. P. (2024). Analisis Kebebasan Berekspresi dan Sosial Media. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis (JIKB)*, 15(2), 89–94. <https://doi.org/10.47927/jikb.v15i2a.850>
- Brüggemann, M., & Meyer, H. (2023). When debates break apart: discursive polarization as a multi-dimensional divergence emerging in and through communication. *Communication Theory*, 33(2–3), 132–142. <https://doi.org/10.1093/ct/qtad012>
- Burleson, B. R., & Kline, S. L. (1979). Habermas' theory of communication: A critical explication. *Quarterly Journal of Speech*, 65(4), 412–428.
- Fitria, T. N. (2021). Artificial Intelligence (Ai) in Education: Using Ai Tools for Teaching and Learning Process. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 4(1), 134–147. <https://www.blackboard.com/teaching-learning/learning->
- Lewar, P. P., & Madung, O. G. N. (2022). Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas. *Jurnal Ledalero*, 21(2), 150. <https://doi.org/10.31385/jl.v21i2.315.150-161>
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2021). *Theories of Human Communication* (12th ed.). Waveland Press.
- Munir, M. I. Al. (2023). Dari Kritis Ke Tindakan Komunikatif: Kritik Jürgen Habermas terhadap Modernitas dan Rasionalitas. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 19(1), 157–179. <https://doi.org/10.24239/rsy.v19i1.1320>
- Pratiwi, A., Putri, A. L., Bahirah, H. I., & Syahnanda, R. (2022). Dinamika Komunikasi Publik Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pandemi Covid-19. *KAGANGA KOMUNIKA: Journal of Communication Science*, 4(2), 74–86. <https://doi.org/10.36761/kagangakomunika.v4i2.2040>
- Ruler, B. van. (2018). Communication Theory: An Underrated Pillar on Which Strategic Communication Rests. *International Journal of Strategic Communication*, 12(4), 367–381. <https://doi.org/10.1080/1553118X.2018.1452240>

- Schlosberg, D. (1995). Communicative Action in Practice: Intersubjectivity and New Social Movements. *Political Studies*, 43(2), 291–311. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1995.tb01713.x>
- Whiting, J. B., & Cravens, J. D. (2016). Escalating, Accusing, and Rationalizing: A Model of Distortion and Interaction in Couple Conflict. *Journal of Couple and Relationship Therapy*, 15(4), 251–273. <https://doi.org/10.1080/15332691.2015.1055417>